

# Pengawasan Barang Dan Jasa Beredar Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau (Studi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis)

Alfredo Cristanto<sup>1</sup> Eko Handrian<sup>2</sup>

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia  
Alfredocristanto8@student.uir.ac.id ekohandrian@soc.uir.ac.id

Received : August 7, 2024;

Accepted : 10 August 2024

## Abstract

*This research is to analyze and explain the supervision of circulating goods and services in the field of industrial supervision, consumer protection and orderly commerce, the Department of Industry, Trade, Cooperatives, Small and Medium Enterprises of Riau Province (Study of Mandau District, Bengkalis Regency). Using Siagian theory with Direct Supervision and Indirect Supervision Indicators. This type of research uses Qualitative Descriptive. Research Results Direct and indirect supervision is very important to ensure that goods and services in circulation are safe, of good quality and in accordance with applicable regulations. This aims to protect consumers and maintain commercial order. Supervision is carried out through direct inspections, market monitoring, data analysis and consumer complaints. Direct inspection involves physical checking and document verification, while indirect supervision relies on data and reports from various sources. Simplification and Update of Regulations Review and simplify existing regulations and update them according to the latest developments to make it easier for business actors to comply and make it easier for officers to enforce the law*

**Keywords:** *Supervision, Goods and Services in Circulation and Consumer Protection*

## Abstrak

Penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan pengawasan barang dan jasa beredar bidang pengawasan industri, perlindungan konsumen dan tertib niaga Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau (Studi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis). Menggunakan teori Siagian dengan Indikator Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung. Tipe penelitian menggunakan Deskriptif Kualitatif. Hasil Penelitian Pengawasan langsung dan tidak langsung sangat penting untuk memastikan barang dan jasa yang beredar aman, berkualitas, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ini bertujuan melindungi konsumen dan menjaga ketertiban niaga. Pengawasan dilakukan melalui inspeksi langsung, pemantauan pasar, analisis data, dan pengaduan konsumen. Inspeksi langsung melibatkan pengecekan fisik dan verifikasi dokumen, sementara pengawasan tidak langsung mengandalkan data dan laporan dari berbagai sumber. Penyederhanaan dan Pembaruan Regulasi Meninjau dan menyederhanakan regulasi yang ada serta memperbarui sesuai dengan perkembangan terbaru untuk memudahkan pelaku usaha dalam mematuhi dan memudahkan petugas dalam penegakan hukum

**Kata kunci :** *Pengawasan, Barang dan Jasa Beredar dan Perlindungan Konsumen*

## Pendahuluan

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perdagangan merupakan urusan pemerintahan konkuren kategori pilihan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan konkuren bidang perdagangan terdiri dari beberapa subbidang yang secara lebih jelas terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di zaman era modern ini, kebutuhan akan barang elektronik sangat meningkat tinggi. Barang elektronik memang menjadi gaya hidup di dunia yang serba canggih ini, bahkan untuk mendapatkannya orang-orang rela menabung bertahun-tahun dari penghasilannya demi mendapatkan barang elektronik yang didambakannya. Harga dan jenis barang elektronik di pasaran sangat beragam, bahkan jika konsumen tidak cerdas dan teliti dalam memilih, seringkali konsumen tertipu akan kualitas barangnya. Konsumen tidak bisa disalahkan sepenuhnya dalam hal ini, karena bagaimanapun konsumen telah mempercayai keberadaan barang dan/ jasa di pasaran sudah mendapatkan pengawasan oleh Pemerintah. Sejak UUPK diberlakukan dan seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan produk teknologi khususnya produk telematika dan elektronika di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang sangat pesat. Namun permasalahannya, walaupun UUPK ini telah lama di sahkan, masih saja pelaku usaha tidak mengindahkan aturan tersebut, seperti tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sesuai Pasal 8 Huruf (j) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Seringkali Pelaku usaha elektronik mengelabui konsumen terhadap iklan-iklan elektronik yang dibuatnya, seperti: Iklan elektronik yang mengatakan Paling TOP Di Indonesia, iklan elektronik yang mengatakan produk mereka paling terbagus, Memiliki standar tertentu, dan lain sebagainya. Hal ini tentunya melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, kewajiban-kewajiban yang masih dilanggar yaitu kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku dan kewajiban untuk memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan. Sedangkan pelanggarannya yaitu pelanggaran atas hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang akan dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan. Selain ini pelanggaran yang sering terjadi juga mengenai penggunaan klausula baku dalam hal ini pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang mengungkapkannya sulit dimengerti.

Berdasarkan Uraian diatas terdapat fenomena permasalahan yang terjadi yang dirangkum penulis sebagai berikut :

1. Barang elektronik tersebut harus memiliki petunjuk manual dalam bahasa Indonesia. Kewajiban pelaku usaha mencantumkan petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j UU Perlindungan Konsumen

2. Barang elektronik tersebut harus memiliki garansi minimal 1 tahun. Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas menyatakan bahwa salah satu dari kewajiban pelaku usaha adalah memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
3. Barang elektronik tersebut harus terdaftar di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan adanya bukti sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan RI. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

## **Tinjauan Pustaka**

### **Konsep Administrasi**

Menurut Nurman Dkk (2023;21) Administrasi merupakan sistem dari suatu kegiatan formal yang dilakukan secara teratur, sistematis dan saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara sub sistem atau bagian dengan bagian yang lain saling berkaitan dan saling menentukan.

Menurut Rahmat (2013;24) Administrasi adalah keseluruhan proses penyelenggara dalam usaha kerja sama dua orang atau lebih atau usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber (personel maupun material) secara efektif, efisiensi dan rasional untuk menunjang tercapainya tujuan.

Menurut Siagian (2003:2) administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

### **Konsep Organisasi**

Menurut Hamim (2013;5) Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan, tujuan itu bermacam-macam. Karena beranekaragam macamnya tujuan itu, maka beraneka macam pula bentuk dan susunan organisasi tersebut

Menurut Robbin (2000:4) "organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan".

Menurut Siagian (2003:6) organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

### **Konsep Manajemen**

Pendapat Siagian (2003:5) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.

Menurut Nurman Dkk (2023;132) Manajemen publik merupakan administrasi organisasi pemerintah dan non profit pada dasarnya sama dengan manajemen sektor swasta/bisnis. Manajemen Publik merupakan media ataupun aktor penentu yang memiliki peran dalam setiap permasalahan sosial dan hal tersebut dilakukan dengan bentuk wacana atau debat dan melakukan perbaikan serta melaksanakan setiap amanah rakyat sebagai bentuk akuntabilitas kepada rakyat.

### **Konsep Pengawasan**

Menurut Handoko (2010:359) adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dengan pengawasan, langkah proses pengawasan adalah langkah perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan suatu kegiatan.

Siagian (2003:112) mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya.

Menurut Siagian (2003:115) mengatakan bahwa proses pada dasarnya dilaksanakan dengan menggunakan dua macam teknik, yaitu :

1. Pengawasan langsung (direct control), ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk :
  1. Inspeksi langsung;
  2. The-spot observation; dan
  3. On-the-spot report.
2. Pengawasan tidak langsung (indirect control), ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini dapat berbentuk Tertulis; dan Lisan

Menurut Handayani (2000:144) terdapat macam-macam pengawasan yakni :

1. Pengawasan dari dalam (internal control), Pengawasan dari dalam berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/unit pengawas bertugas mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi. Data-data dan informasi ini digunakan oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam menilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat melakukan tindakan perbaikan (korektif) terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan;
2. Pengawasan dari luar organisasi (external control) Pengawasan eksternal berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi. Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi adalah aparat pengawasan yang

bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya;

3. Pengawasan preventif, Pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud perencanaan preventif adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam system pemeriksaan anggaran pengawasan preventif disebut pre audit. Pengawasan preventif dapat dilakukan dengan usaha-usaha :
  - a. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan system prosedur, hubungan dan tata kerjanya;
  - b. Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
  - c. Menentukan kedudukan. Tugas, wewenang dan tanggung jawabnya;
  - d. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian kerjanya;
  - e. Menentukan system koordinasi, pelaporan dan pemeriksaan; dan
  - f. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.
4. Pengawasan Represiff, adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif adalah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dalam system pemeriksaan anggaran pengawasan represif ini disebut post audit. Adapun pengawasan represif ini dapat digunakan system-sistem pengawasan sebagai berikut :
  - a. Sistem komperatif;
  - b. Sistem verikatif;
  - c. Sistem inspektif; dan
  - d. Sistem investigative.

## Metode

Tipe penelitian ini penulis menggunakan Deskriptif Kualitatif. penelitian deskriptif kualitatif menurut Arikunto (2005:234) adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Menurut Sugiyono (2022:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Lokasi penelitian ini adalah Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau (Studi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis) alasan mengambil judul ini agar fokus yang jelas dan mendalam pada isu-isu penting terkait pengawasan barang dan jasa beredar di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, serta

memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kualitas pengawasan dan perlindungan konsumen di Provinsi Riau khususnya Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau dan Toko Yang menjual Barang dan jasa beredar. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini berupa arsip, literatur serta laporan tertulis yang berhubungan dengan Penelitian : Jurnal Terkait Dengan Pengawasan Barang Jasa beredar, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau, Daftar Barang dan Jasa Beredar dan Regulasi yang Berlaku.

Adapun cara yang dipakai penulis dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah Observasi Yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan informasi, data dan lainnya mengenai Pengawasan yang ada di Kecamatan Mandau. Dan juga pengamat secara langsung terhadap hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau. Wawancara Yaitu suatu pengumpulan data dengan cara wawancara guna melengkapi data yang diperoleh dari observasi dan kusioner, yang meliputi Pengawasan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau. Dokumentasi Merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi

Analisis terdiri dari alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu : Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan/Verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut Menurut Miles & Huberman (dalam Sugiyono 2020:133) : Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut : Pengumpulan Data, Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi, Reduksi Data, Menurut Miles dan Huberman (1992:16) Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan; Penyajian Data, Menurut Miles dan Huberman (1992:17) membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan penulisan hasil data yang dikumpulkan oleh peneliti guna mempermudah penafsiran data tersebut. Data yang dihasilkan tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Hal ini bertujuan agar penyajian data dapat dibuat dengan baik serta pembaca mudah mengerti maksud dan

tujuannya. Menarik Kesimpulan/Verifikasi, Menurut Miles dan Huberman (1992:19) Penarikan Kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan dilakukan dari beberapa pernyataan yang diketahui nilai kebenarannya yang disebut premis. Kemudian, dengan menggunakan prinsip-prinsip logika diperoleh pernyataan baru yang disebut kesimpulan/konklusi yang diturunkan dari premis yang ada. Penarikan kesimpulan seperti ini disebut juga argumentasi.

## **Hasil dan Pembahasan**

Pengawasan barang dan jasa umumnya dilakukan oleh otoritas terkait, seperti Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di tingkat provinsi. Berikut beberapa langkah umum dalam pengawasan barang dan jasa:

### **Pengawasan Langsung**

Indikator Pengawasan Langsung Pengawasan langsung merupakan praktik yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau. Ini melibatkan inspeksi rutin terhadap lokasi produksi, penyimpanan, dan distribusi untuk memastikan bahwa produk aman, berkualitas baik, dan memenuhi standar yang ditetapkan. Sekretariat memainkan peran penting dalam koordinasi dan administrasi, memastikan bahwa tim inspeksi memiliki sumber daya yang diperlukan dan jadwal yang jelas. Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Peraturan Komersial bertanggung jawab atas pengawasan langsung. Mereka menghadapi tantangan seperti mengakses lokasi terpencil dan memantau berbagai macam barang dan jasa. Tim memastikan pelaku usaha mematuhi peraturan yang berlaku, dengan menggunakan pendekatan persuasif dan edukatif bila diperlukan. Sampel produk diambil selama inspeksi dan diuji di laboratorium untuk memastikan memenuhi standar kualitas dan keamanan. Hasil pengujian digunakan untuk mengambil tindakan lebih lanjut jika ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran. Departemen ini juga mendidik konsumen tentang hak-hak mereka dan bagaimana mengenali produk yang aman dan berkualitas. Mereka menyediakan mekanisme pengaduan bagi konsumen untuk melaporkan masalah. Peraturan dan standar disosialisasikan kepada produsen, distributor, dan pengecer. Pengawasan langsung memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Pelanggaran akan dikenakan tindakan tegas, termasuk sanksi atau pembinaan. Pemilik toko yang menjual barang dan jasa yang beredar mengapresiasi pengawasan langsung, karena membantu memastikan produk aman dan berkualitas baik. Hal ini juga membantu mereka mematuhi peraturan yang berlaku dan memberikan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka beli.

### **Pengawasan Tidak Langsung**

Indikator Pengawasan Tidak Langsung atau pengawasan jarak jauh dilakukan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau melalui berbagai cara. Laporan dari bawahan, pemantauan pasar, analisa data, pengaduan konsumen, dan kerjasama dengan instansi terkait digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Sekretariat memainkan peran penting dalam mengumpulkan dan memproses data dari berbagai sumber, memberikan informasi yang relevan kepada tim pemantauan, dan membantu analisis data untuk mendeteksi potensi masalah atau pelanggaran. Tantangan dalam pengawasan tidak langsung mencakup terbatasnya akses terhadap informasi yang akurat dan lengkap, kecepatan dalam menanggapi keluhan

konsumen, dan memastikan keandalan dan relevansi data yang dikumpulkan. Pemantauan pasar dilakukan melalui pengumpulan data dari berbagai sumber, antara lain laporan penjualan, keluhan konsumen, dan observasi pasar, serta dengan menggunakan teknologi seperti sistem informasi untuk memantau pergerakan barang dan mendeteksi anomali yang dapat mengindikasikan adanya pelanggaran. Edukasi konsumen juga diberikan untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang hak-hak mereka dan cara melaporkan permasalahan, serta mekanisme pengaduan dikelola agar konsumen dapat melaporkan produk yang tidak memenuhi standar. Informasi dari pengaduan ini digunakan untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Peraturan dan standar disosialisasikan kepada seluruh pelaku usaha, dan teknologi informasi digunakan untuk memantau kepatuhan. Pengawasan tidak langsung membantu pelaku usaha menjaga kualitas produk dan melibatkan mereka dalam proses pemantauan melalui mekanisme pengaduan.

### **Faktor Penghambat**

Hambatan Pengawasan Barang Dan Jasa Beredar Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau (Studi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis).

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Jumlah petugas pengawasan yang terbatas dapat menjadi kendala dalam menjangkau seluruh wilayah yang harus diawasi, terutama daerah yang terpencil.
2. Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Pelaku Usaha, Beberapa pelaku usaha mungkin kurang memahami atau tidak mematuhi regulasi yang berlaku, sehingga menyulitkan upaya pengawasan dan penegakan hukum.
3. Ketidakterlengkapan Data dan Informasi, Data yang tidak lengkap atau akurat mengenai produk dan pelaku usaha dapat menghambat proses pemantauan dan penilaian risiko.
4. Koordinasi Antar Instansi yang Tidak Optimal, Pengawasan yang efektif memerlukan kerjasama dan koordinasi antara berbagai instansi terkait. Kurangnya koordinasi dapat menghambat tindakan yang cepat dan tepat.
5. Kendala Teknologi dan Infrastruktur, Teknologi informasi yang belum optimal atau infrastruktur yang kurang mendukung dapat menghambat proses pengumpulan dan analisis data.
6. Regulasi yang Kompleks atau Kurang Diperbarui, Regulasi yang terlalu kompleks atau tidak mengikuti perkembangan terbaru dapat menyulitkan pelaku usaha untuk mematuhi, dan menyulitkan petugas untuk menegakkan hukum

### **Kesimpulan**

Pengawasan Barang Dan Jasa Beredar Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Riau (Studi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis). Pengawasan langsung dan tidak langsung sangat penting untuk memastikan barang dan jasa yang beredar aman, berkualitas, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ini bertujuan melindungi konsumen dan menjaga ketertiban niaga. Pengawasan dilakukan melalui inspeksi langsung, pemantauan pasar, analisis data, dan pengaduan konsumen. Inspeksi langsung melibatkan pengecekan fisik dan verifikasi dokumen, sementara pengawasan tidak langsung

mengandalkan data dan laporan dari berbagai sumber. Berbagai pihak, termasuk Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pengawasan, dan Sub Koordinator di berbagai bidang, memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas pengawasan. Koordinasi antara instansi terkait juga sangat krusial untuk keberhasilan pengawasan.

## Daftar Pustaka

### Buku dan Jurnal:

- Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, S. 2005. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik: Jakarta: Rineka. Cipta.
- Creswell, John, W. 2014. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- George, R, Terry, Leslie W. Rue. 2003. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Hamim, Sufian, 2005. Administrasi, Organisasi, Manajemen, Pekanbaru: UIR Press.
- Hamim, Sufian dan Indra Muchlis Adnan. 2013. Administrasi, Organisasi dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep dan Aplikasi (R. Wahidi (ed.)). Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of

collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.

- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.
- Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.
- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).

- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Hamim, S. (2005). *Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.

- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Muliando, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.
- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163-175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.

- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.
- Al Hafis, R. I., & Yogya, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in

Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).

- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.
- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.

- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.
- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.
- Hamim, Sufian dan Indra Muchlis Adnan. 2013. *Manajemen Strategis Dalam Organisasi*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika
- Hamim, Sufian dan Wiwik Suryadartiwi. 2022. *Filsafat Ilmu Dan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*. Purbalingga: CV.Eureka Media Aksara
- Handyaningrat, S. 2020. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen* (7th ed.). Jakarta : Gunung Agung

- Keban, Yeremias, T, 2014. Enam Dimensi Strategis Administrasi. Publik, Konsep, Teori dan Isu (Edisi Ketiga), Yogyakarta: Gava Media.
- Miles, M. B. dan A. M. Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Penerjemah Tjetjep Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nurman. 2023. Teori Administrasi Administrative Executif. Sleman: Deeppublish
- Pasolong, Harbani. 2020. Metode Penelitian Administrasi Publik, Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, Harbani. 2019. Teori Administrasi Publik, Bandung: Alfabeta.
- Rahmat, 2013. Filsafat Administrasi, Bandung: Pustaka Setia
- Siagian Sondang P. 2003. Filsafat Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Suprayogi. 2011. Administrasi Publik : Konsep dan Perkembangan. Ilmu di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syafri, Wirman, 2012. Studi Tentang Administrasi Publik, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Tim Penyusun, 2013. Buku Pedoman Penulisan, Badan Penerbit FISIPOL Pekanbaru : UIR

**Regulasi:**

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Riau